

**POLA HUBUNGAN INDUK SEMANG -
ANAK LADANG;
Tinjauan Keterkaitan Revolusi Agraria,
Struktur Sosial dan Dinamika
Pedesaan Kerinci ***

oleh
Edi Indrizal

Abstract

The agrarian revolution carried out around the second and the third decades of the twentieth century in Kerinci appeared more as a result of Colonial policies, capitalists' penetration, and money economy— factors that caused social and cultural changes in the rural society. One of the important characteristics of the agrarian revolution is the strengthening the economic role of people's farms rooted in a tradition oriented toward the world commercial market. The pattern of induk semang (master) - anak ladang (farm labor) relationship is traditionally instituted became more established after the agrarian revolution. The understanding of the induk semang - anak ladang relationship in the organization of agricultural production is one of the important aspects that supports our knowledge about the social structure and the dynamic of rural society in the recent Kerinci.

I. PENDAHULUAN

Kecendrungan bertambah maraknya pengkajian mengenai Kerinci semakin terlihat pada periode satu dekade terakhir ini. Para penulis lokal utamanya terkonsentrasi pada pendokumentasian adat istiadat setempat (Payung dkk. . . . :Ajo Liko,

1991). Beberapa kajian tertuju pada analisa sejarah sosial dan simbolik (Watson, 1989; Bekels, 1992). Sebagian besar kajian lainnya tertuju pada penelitian seputar pola pertanian, perubahan ekologi dan program konservasi (Siebert, 1989; Yudiz dan Bertrand, 1990; Fedensieu, 1991; Indrizal, Hazwan dan Musral, 1991/1992; serta berturut-turut pada tahun 1990 dan 1991 dilaksanakannya survey Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh Bakosurtanal, survey agroekosistem pedesaan sekitar TNKS oleh Kepas, survey agroekosistem danau oleh AWB Indonesia dan monitoring program pengembangan masyarakat sekitar TNKS oleh WWF For Nature).

Pada pokoknya kecenderungan orientasi kajian-kajian dimaksud erat hubungannya dengan proses perubahan sosial dan ekologi yang cepat di Kerinci pada abad ini. Di antara kajian menekankan perhatian pada upaya pendokumentasian dan penggalian adat istiadat dan nilai sosial-budaya lokal yang terancam punah, di antara yang lainnya menekankan perhatian pada karakteristik usahatani pedesaan, kedudukan ekologis Kerinci sebagai "*top of Sumatera*" serta implikasi kebijakan pengembangan masyarakat dan perlindungan hutan.

Berlangsungnya proses perubahan sosial dan ekologi yang pesat di Kerinci sebenarnya telah mulai diungkapkan dalam studi-studi Schrieke (1955). Sebagaimana diungkapkan dalam (1976(1963)), Schrieke seorang sosiolog Belanda yang cerdas melukiskan bahwa Kerinci, ketika rakyat petani berpapasan dengan meningkatnya *onderneming*, disinilah permulaan "revolusi agraria". Menurut Schrieke, pengembangan

"perusahaan besar" *onderneming-onderneming* antara tahun 1908 - 1912 diikuti pengenalan tanaman komersial mewarnai penetrasi kapitalis dan menandai revolusi agraria yang membawa perubahan sosial dan ekologi yang pesat di Kerinci. Uraian-uraian Schrieke selanjutnya diperkukuh Geertz dengan memandang apa yang terjadi di Kerinci (seperti halnya di Jawa, walau secara agak berlainan) bukan hanya perubahan pola penggunaan tanah atau teknik produksi semata-mata; yang berubah adalah sistem segala pranata, praktek, dan ide yang relevan dan saling berhubungan ---"inti kebudayaan"--- (Geertz, 1976(1963)).

Di antara temuan penting dari studi Schrieke dan analisa Geertz yang kurang ditindak-lanjuti dalam studi-studi Kerinci kontemporer adalah perhatiannya akan aspek-aspek struktur sosial dan dinamika pedesaan yang melingkupi revolusi agraria yang berlangsung. Jika benar pola pertanian pedesaan dan perubahan ekologi Kerinci merupakan masalah-masalah serius berkenaan dengan ancaman dramatis bagi kemanusiaan dan lingkungan hidup, maka secara sosiologis analisa struktur sosial dan dinamika pedesaan berkenaan dengan pola pertanian dan perubahan ekologi tersebut tidak kalah penting untuk dipahami. Secara mendasar persoalan ini makin menemukan relevansinya apabila dihubungkan dengan pemahaman dan penerapan konsep peisan (*peasant*) dan dinamika pedesaan (*rural change*) yang khas di Kerinci.

Dalam tulisan singkat ini kami tidak bermaksud menjawab segala aspek struktur dan dinamika sosial dimaksud, kecuali memfokuskan diri pada analisa proses-proses yang mendorong

bertahannya institusi tradisional berkenaan dengan pola hubungan induk semang - anak ladang dalam organisasi produksi dan struktur pertanian di Kerinci. Titik-tolaknya adalah bahwa pola hubungan induk semang - anak ladang semakin melembaga dalam tatanan kehidupan pedesaan Kerinci berkaitan dengan proses perubahan pola pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah; penetrasi kapitalis, komersialisasi pertanian dan perembesan ekonomi uang dalam masyarakat desa; serta hubungan-hubungan masyarakat peisan dengan masyarakat yang lebih luas, yang kesemuanya turut didukung oleh kondisi-kondisi ekologis dan sosio-budaya setempat.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam penulisan ini, selanjutnya berturut-turut akan didiskusikan terlebih dahulu: pertama, pola-pola pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian; dan kedua, tinjauan tentang revolusi agraria yang bedagang dan analisa respon petani terhadap perubahan itu.

II. PENGUASAAN TANAH;

Pola dan Tendensi Perubahannya

Untuk memperoleh pemahaman mengenai pola pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah di Kerinci, lebih dulu diperlukan penelusuran akan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Berkenaan dengan ini sering dikatakan bahwa azas-azas atau sistem garis keturunan yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat peisan di Kerinci tidaklah seragam.

Watson (1989) seperti juga dirujuk Fedensieu (1991) menyebutkan sebagian daerah Kerinci, terutama di bagian utara Kerinci (Kerinci Hulu), di mana terdapat pengaruh kebudayaan Jambi dan Palembang, lebih cenderung menerapkan sistem garis keturunan berdasarkan ibu dan ayah (bilateral) sesuai dengan ungkapan "*orang tuo nan baduo, nenek nan berempat dan moyang nan delapan*".

Namun, terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, pada dasarnya berbagai kelompok masyarakat peisan Kerinci umumnya mengenal sejumlah unit sosial yang didasarkan pada sistem kekerabatan, walaupun nama dari kelompok-kelompok kesatuan kekerabatan itu tidak selalu sama antara suatu daerah dengan daerah lainnya (Indrizal et. al., 1992). Kelompok-kelompok itu biasanya terdiri atas empat tingkat, yaitu *tumbi* atau *pintu* (*nuclear family*) sebagai kesatuan paling kecil; *kalbu* kesatuan dari beberapa *tumbi/pintu*; *perut* atau *kaum* kesatuan dari beberapa *perut/kaum* disebut *luhah* atau *kurung*. Dalam sistem sosial tradisional, unit sosial terpenting adalah kesatuan keluarga luas (*extended family*) yang berlandaskan pada pola kepemimpinan *seko tigo takah; tungganai, ninik mamak* dan *depati*.

Jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya apa yang dikemukakan di atas lebih merupakan suatu keadaan yang ideal tradisional. Dalam kenyataannya kedudukan dan peranan *tumbi*, terutama sebagai kesatuan sosial-ekonomi yang terpenting dan fungsional dalam masyarakat peisan Kerinci dewasa ini jauh lebih kuat daripada kesatuan-kesatuan

kekerabatan lainnya. Di samping karena implikasi faktor-faktor eksternal meliputi tata hubungan masyarakat Kerinci dalam struktur masyarakat yang lebih luas (revolusi agraria, penetrasi kapitalis dan perembesan ekonomi uang), perubahan yang berlangsung turut ditentukan oleh faktor-faktor internal. Dari segi struktural hal penting yang turut menentukan misalnya pola pewarisan harta benda pada masyarakat Kerinci menyaangkut lebih dari satu orang ahli waris, atau dalam pengertian apa yang disebut Wolf (1985(1966)) pola pewarisan yang dapat dibagi (*partible inheritance*).

Adapun secara tradisional pola pemilikan tanah pertanian di Kerinci berhubungan dengan penggolongan masyarakat bersangkutan mengenai harta pusaka. Pada prinsipnya ada dua bentuk harta pusaka dalam masyarakat Kerinci yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta peninggalan atau warisan yang diperoleh dari beberapa angkatan (generasi) atau peninggalan nenek moyang. Pusaka rendah adalah harta atau kekayaan yang diperoleh seseorang baik dengan jalan meneruko dan melatih (seperti membuka hutan untuk dijadikan lahan) ; diperoleh seorang laki-laki sebelum kawin (*harto bujang*); diperoleh seorang gadis sebelum kawin (*harto ngadin*); maupun yang dipeoleh pasangan suami-istri selama perkawinan (*harto pencariun*).

Berdasarkan penggolongan harta benda pusaka tinggi dan rendah itu, selanjutnya pewarisan antara keduanya juga tidaklah sama pula. Harta pusaka tinggi biasanya terdiri atas tanah sawah dan perumahan yang terletak di sekitar komunitas mereka, disebut dengan istilah pihak *basuduk* empat (tanah

berparit bersudut empat) yang berhak mewarisinya hanyalah anak perempuan. Namun status tanah ini adalah tanah adat atau disebut juga tanah ajun arah, yaitu tanah yang semula dibuka oleh kepala atau penguasa adat (*depati ninik-mamak*) untuk dijadikan tempat tinggal (*dusun*), tanah sawah-ladang dan tanah status tanah adat, maka bentuk penguasaan tanah ini di tingkat *tumbi* hanya merupakan hak pakai -- hak milik perorangan tidak diperkenankan. Sebaliknya harta pusaka rendah pola penguasaannya merupakan tanah hak milik yang diwarisi kepada anak perempuan dan laki-laki dengan cara pembagian sama besar.

Meskipun terdapat perbedaan pola pewarisan dan bentuk harta pusaka dalam kenyataannya terdapat kecenderungan bahwa perbedaan itu hampir-hampir tidak ada lagi. Indrizal et. al. (1992) melukiskan bahwa di dua dari tiga daerah lokasi penelitiannya perbedaan-perbedaan itu dalam kenyataannya tidak dijumpai lagi. Kedua macam harta pusaka itu dapat saja diwarisi oleh anak perempuan melalui prinsip musyawarah, mufakat dan persetujuan adik-beradik atas dasar *alah seko dek janji, alah janji dek samo embuah*.

Dengan pola pewarisan demikian, ditambah dengan munculnya tradisi baru yakni suami-istri dan anak-anaknya (*tumbi*) telah tinggal di rumah sendiri, walaupun masih tetap menganut pola menetap uxorilokal, bahkan ada pasangan suami-istri membangun rumah di atas tanah yang mereka beli sendiri, jelas memperkuat kedudukan dan peranan *tumbi* sebagai kesatuan sosial-ekonomi paling penting dan fungsional. Gejala ini paralel dengan proses menguatnya pula pola

hubungan berdasarkan penguasaan tanah pertanian meliputi: sistem bagi hasil, sistem buruh-upahan, atau munculnya institusi khas di pedesaan Kerinci yang bermula dari proses peralihan produksi pertanian -- yang hendak dibahas dalam tulisan ini -- yaitu hubungan induk semang - anak ladang.

III. PERALIHAN PRODUKSI PERTANIAN DAN ANALISA RESPON TERHADAP PERUBAHAN

Penggolongan Usahatani; Kontras yang Seimbang

Kondisi ekologis Kerinci yang berlembah-lembah, berbukit-bukit, bergunung-gunung, banyak danau dan aliran sungai, curah hujan yang relatif tinggi dan merata sepanjang tahun, serta beriklim tropik basah, menjadi syarat pokok kenapa pola usahatani yang sebenarnya berciri kontras (sawah dan ladang) telah berabad-abad dikenal, dikembangkan dan dipertahankan secara berdampingan dalam pentas pertanian pedesaan Kerinci hingga kini. Kedua bentuk tradisi pertanian yang sesungguhnya kontras baik dari segi persyaratan struktur ekologi, teknologi, orientasi ekonomi, maupun ciri sosial yang menyertainya ini bahkan semakin mapan menemukan bentuknya dalam tatanan dan dinamika pedesaan Kerinci.

Demikianlah di lembah-lembah dengan sedikit dataran semaksimalnya telah diolah menjadi lahan persawahan dengan tanaman tunggal padi, berarsitektur terbuka dan memenuhi

kebutuhan mineralnya atas ketergantungan pada air yang terpenuhi oleh pengairan bersumber dari banyaknya aliran sungai di sekitarnya serta mampu memuaskan konsentrasi permukiman penduduk. Sementara kawasan yang paling luas di kemiringan bukit dan pegunungan dimanfaatkan untuk areal perladangan dengan ragam palawija dan tanaman keras dengan pola bertendensi meniru hutan; rapat, berdesak-desak, berasitektur pelindung tertutup, indeks diversitas tinggi dan keseimbangannya yang ringkih, yang selanjutnya dapat menghasilkan padang alang-alang (lahan kritis) atau mendorong penyebaran penduduk.

Dengan berlangsungnya revolusi agraria -- meminjam konsep Schrieke dan Geertz -- pada kurun peaggal awal abad-20, di antara para ahli, terutama Schrieke dan Geertz, mengindikasikan perubahan pertanian Kerinci dari bentuk dasar usahatani (sawah dan ladang) menuju pola usahatani kebun (perkebunan rakyat). Khususnya pertanian ladang yang dikatakan mendorong mobilitas pertanian dan permukiman yang berpindah-pindah berangsur-angsur berubah menuju pola pertanian dan permukiman menetap.

Meskipun Geertz menilai revolusi agraria itu secara keseluruhan setelah 35 tahun diakuinya barulah merupakan satu revolusi semu (Sajogyo dalam Geertz, 1976), namun seperti juga Schrieke, mereka belum memasukkan argumentasinya akan adanya peralihan produksi pertanian *cassia vera* (kayu manis) yang secara besar-besaran mulai diusahakan rakyat setelah periode 1960-an yang menjadi primadona hingga kini. Dalam penelitian yang lebih akhir Indrizal et al. (1992)

mencatat bahwa peralihan produksi ke tanaman *cassia vera* menandai bahwa tradisi pertanian ladang (bukan kebun, meskipun cenderung monokultur) tetap mapan dengan cirinya yang khas di Kerinci, yaitu: tetap mendorong ekstensifikasi lahan, ekspansi hutan, penyebaran penduduk, pertumbuhan dan penyebaran kampung, sesuai dengan siklus tanaman berusia panjang (rata-rata dalam 15 tahun baru dipanen), maju terus tanpa mengenal titik balik -- jadi, tidak bersifat siklus --. Suatu hal yang semula tidak/belum dilihat Schrieke maupun Geertz dalam analisis revolusi agraria dan perubahan ekologi di Kerinci.

Penduduk Kerinci sendiri menggolongkan usahatani mereka ke dalam 3 tipologi, yaitu: sawah, pelak dan ladang. Sawah merupakan usahatani makanan pokok padi yang memerlukan pengairan yang biasanya terdapat di sekitar permukiman kampung. Pelak, hampir semacam kebun campur di mana diusahakan beragam palawija dan tanaman tua dalam jumlah serba sedikit yang letaknya juga di sekitar permukiman dan kampung. Sementara ladang, menunjuk pada usahatani yang cenderung monokultur, yaitu usahatani tanaman keras komersil yang letaknya biasanya jauh dari kampung, bahkan hingga di hutan pedalaman. Hubungannya adalah, jika penduduk telah mengembangkan sawah dan diikuti pengembangan pelak, berarti indikasi adanya pertumbuhan perkampungan baru dan sekaligus pertanda sudah berlangsung pula ekspansi ladang baru di luar kampung itu. Pada pokoknya pengembangan sawah berkaitan erat dengan penetapan permukiman permanen, sedang pelak merupakan hasil evolusi

ladang dan menandai adanya ekspansi ladang baru di luar kampung.

***Peralihan Orientasi Produksi Pertanian
dan Respon terhadap Perubahan***

Peralihan orientasi produksi dan relevansi agraria di Kerinci mulai terlihat pada sekitar kurun dekade kedua dan ketiga abad-20. Jika pada masa sebelumnya ekonomi sawah lebih berorientasi pasar sementara ekonomi ladang menekankan orientasi subsistensi atau sebatas menjangkau pasar lokal, maka pada periode setelah itu (hingga kini) berlangsung sebaliknya. Ekonomi sawah lebih berorientasi subsistensi, bahkan harus mengimpor/mendatangkannya dari pasokan pasar daerah lain, sementara ekonomi ladang cenderung semakin memantapkan nilai komersial dan orientasi pasarnya.

Schrieke melukiskan bahwa di tanah pegunungan Kerinci yang terletak di bagian selatan Keresidenan Sumatera Barat, ekspor kopi meningkat dari 190 ton pada tahun 1913 sampai 300 ton pada tahun 1923, dan hampir 3.000 ton pada tahun 1926 (Geertz, 1976(1963)). Dalam kurun waktu cuma 3 tahun, ekspor beras Kerinci merosot 75% dan mengakibatkan daerah ini harus mengimpor. Selanjutnya, gejala yang tidak terliput dalam pengamatan Schrieke maupun Geertz, setelah tahun 1930-an berlangsung pula perubahan saat mana rakyat Kerinci beralih produksi menanam cassiavera. Boom perusahaan tanaman kulit manis ini semakin meluas pada periode 1960-an

ke atas (periode Orde Baru). Menurut laporan Bakosurtanal (1990) Kerinci bahkan menjadi daerah pengekspor cassiavera terbesar di negara ini, yaitu mencapai 40% dari ekspor cassiavera Indonesia. Suatu prestasi yang cukup spektakular mengingat Kerinci hanyalah Dati II Kabupaten.

Berturut-turut perubahan pertanian yang cepat di Kerinci gejalanya lebih ditentukan oleh pengaruh kebijakan pemerintah kolonial serta penetrasi kapitalis, komersialisasi dan perembesan ekonomi uang ke dalam masyarakat desa. Respon penduduk Kerinci terhadap inovasi dan perubahan yang datang dari luar menunjukkan akselerasi yang khas. Tidak hanya mematahkan pandangan-pandangan ilmuan seperti Rogers yang beranggapan bahwa masyarakat desa dengan ciri subkultur yang dianutnya sulit menerima inovasi dan perubahan yang diprakarsai orang luar, tetapi juga tidak sesuai dengan pernyataan ekonomi dualistik Boeke yang memandang hanya segelintir lapisan atas masyarakat desa saja yang secara positif mampu mengadaptasi perubahan.

Respon penduduk terhadap perubahan pertanian ini, menurut hemat penulis, juga dapat diterangkan dari pendekatan strategi beradaptasi (*adaptive strategies*). Dalam pendekatan ini tercakup upaya penjelasan moral ekonomi yang mencari jawaban dalam konteks sosio-kultural; upaya penjelasan "rasional peasant" yang memandang kaum tani sebagai aktor ekonomi yang rasional; maupun penjelasan geografi sosial dengan analisa deskripsi dan historikal yang rinci. Schrieke sebagaimana dikutip Geertz menyatakan apa yang disebut tampaknya mentalitas ekonomi, suatu revolusi

dalam semangat yang serupa dengan yang terjadi pada periode kapitalisme awal di Eropa yang ditunjukkan Weber dan Sombart. Secara masuk akal langkah adaptasi petani Kerinci nyata-nyata merupakan respon yang rasional terhadap nilai ekonomi dan pasar yang prospektif dari perubahan yang berlangsung itu. Revolusi agraria di Kerinci tidak hanya mendapat respon penduduk setempat, tetapi diikuti pula dengan meningkatnya mobilitas penduduk dari luar ke daerah ini; dari Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Jawa.

Revolusi agraria di Kerinci yang bercirikan mekuatnya peranan ekonomi ladang tanaman komersial yang berorientasi pasar ekspor mengandung implikasi terhadap perubahan sosial-budayanya. Pola hubungan induk semang - anak ladang merupakan institusi tradisional yang secara khas langgeng bertahan mengiringi perubahan-perubahan dimaksud. Pada bagian berikut ini pola hubungan induk semang - anak ladang itu akan dibahas dalam kaitannya dengan organisasi produksi dan struktur pertanian di Kerinci.

IV. HUBUNGAN INDUK SEMANG - ANAK LADANG DALAM DINAMIKA PEDESAAN

Schrieke mencatat bahwa tampilnya mentalitas ekonomi ke depan dalam revolusi agraria di Kerinci disertai pula oleh perubahan sosial-budaya seperti yang sudah lazim: hak milik tanah makin longgar; individualisme tumbuh sedangkan ikatan kekerabatan luas mengendor; perbedaan dan pertentangan golongan makin tajam, perlawanan makin intensif antara kaum

tua dengan kaum muda, konservatif, dan modern; kewibawaan tradisional melemah dan standar sosial tradisional goyah (Geertz, 1976(1963)). Perubahan pola pemilikan tanah dan proses individualisasi dalam tatanan hubungan sosial antara pemilik tanah dan penggarap lahan terwujud dalam organisasi produksi yang diintensitaskan atas pola penguasaan tanah pertanian, seperti: pola bagi hasil, sistem buruh upahan dan pola hubungan induk semang (IS) - anak ladang (AL).

Ada tiga alasan pokok kenapa pola hubungan IS - AL lebih melembaga dan menjadi khas dalam dinamika pedesaan Kerinci. Pertama, berbeda dari pola bagi hasil dan sistem buruh upahan; pola hubungan IS - AL jaminan ekonomi jangka panjangnya lebih kuat. Kedua, dalam hubungan IS - AL terkadang juga motif sosial yang bernilai asuransi (social insurance). Ketiga, secara umum pola hubungan atas penguasaan tanah yang khas dijumpai di sektor usahatani perkebunan rakyat berakar tradisi ladang yang berorinetasi pasar komersial.

Bentuk dasar hubungan IS - AL sebenarnya berlandaskan pada hubungan ekonomi dengan pola bagi hasil antara IS sebagai pemilik ladang dengan AL sebagai penggarap. Kebanyakan para penggarap adalah merekayang tidak memiliki lahan pertanian di daerah itu. Pada awalnya umumnya mereka adalah para pendatang terutama berasal dari Sumatera Barat, Jambi atau orang Jawa migran kuli kontrak onderneming dahulunya ataupun mereka yang datang lebih kemudian, yang datang ke daerah itu untuk "mencari makan". Namun dalam kenyataannya dewasa ini; karena di satu sisi faktor

prospektifnya nilai ekonomi ladang dan di sisi lain faktor tekanan penduduk atas tanah, ditemui juga (bahkan semakin banyak) di antara AL penggarap itu berasal dari kalangan penduduk asli Kerinci.

Untuk menjadi AL, biasanya langkah pertama dimulai dengan mencari atau menemui pemilik ladang (IS) yang memang tengah memerlukan tenaga AL. Setelah bertemu, maka serangkaian perjanjian ditetapkan antara kedua belah pihak. Kebanyakan AL terdiri dari satu keluarga inti (*tumbi*). Walaupun ada juga di antara AL yang masih melajang, namun tampaknya IS lebih menyukai AL yang telah berkeluarga karena dianggap lebih telaten dan lebih bertanggungjawab.

Sesuai dengan perjanjian yang disepakati, lazimnya ada tiga macam bentuk hubungan IS - AL. Pertama, AL yang ditanggung kebutuhannya oleh IS; mulai dari beras, ikan kering, minyak goreng, minyak tanah, garam, cabe, rokok dll. selama ± 3 tahun. Sekali 15 hari AL turun ke dusun (desa) mengambil jatah ransum dari IS. Aturan bagi hasilnya untuk tanaman tua seperti cassiavera $2/3$ bagian IS dan $1/3$ bagian AL, sementara untuk tanaman muda masing-masing $1/2$ -nya. Cara seperti ini banyak dijumpai di masa lalu dan mulai ditinggalkan dalam dekade terakhir ini, sejak pembukaan hutan baru tidak gencar lagi karena semakin ketatnya undang-undang konservasi hutan. Lagi pula kini, ladang-ladang yang diserahkan kepada AL kebanyakannya adalah ladang yang telah "jadi" lanjutan penggarapan siklus produksi sebelumnya sehingga dengan sendirinya tugas AL tidak begitu seberat mengerjakan ladang yang baru dibuka.

Kedua, AL berjangka, yaitu AL hanya ditanggung beras saja oleh IS, biasanya sekitar 15-20 belek (kaleng takaran berisi 40 kg.) untuk lama 2 - 3 tahun tergantung perjanjian keduanya. Aturan bagi hasilnya sama dengan praktek yang pertama dan ladang yang digarap merupakan ladang yang sudah "jadi". Ketiga, ladang diserahkan kepada AL untuk digarap tanpa tanggungan apapun dari IS. Aturan bagi hasilnya adalah untuk tanaman *cassia vera* tetap sama dengan cara pertama dan kedua yaitu 2/3 bagi IS dan 1/3 bagi AL, namun untuk tanaman-tanaman lainnya seperti kopi dan palawija semuanya menjadi bagian AL.

Meskipun terdapat perbedaan antara ketiga macam hubungan kerja IS - AL, namun sesungguhnya ada beberapa persamaan pokok antara masing-masingnya. Perjanjian dituangkan secara tertulis di atas kertas segel yang biasanya turut diketahui oleh kepala Desa, meliputi kesepakatan hubungan kerja paling kurang 3 tahun setelah tanaman muda tidak bisa ditanam lagi karena pertumbuhan tanaman tua makin rimbun, AL dibolehkan mencari IS lain yang butuh AL pula. Apabila IS masih ingin mempertahankan *cassia vera* untuk dipanen lebih lama (karena semakin tua harga jualnya makin melambung) sedangkan AL sudah minta dibagi sesuai usia panen yang disepakati semula (biasanya \pm 15 tahun), maka bagian untuk AL harus dikeluarkan berdasarkan taksiran nilai uang dari hasil ladang di waktu itu. Dalam setiap hubungan kerja biasanya juga disepakati bahwa IS juga harus menyediakan pondok (rumah ladang), perlengkapan peralatan masak-makan, lampu pelita, tikar, bahkan kadang-kadang juga

alat pertanian seperti cangkul dan parang, sehingga sering dikatakan "AL ketika masuk kerja cukup cuma membawa pakaian saja". Yang terpenting juga, pihak IS dituntut senantiasa menyanggupi meminjamkan beras atau uang buat kebutuhan AL yang mendesak, termasuk biaya sekolah anak, biaya pengobatan, atau biaya-biaya kenduri yang tidak dapat ditanggulangnya segera: walaupun hingga setelah panen cassiavera pinjaman itu baru akan dikembalikan dengan memotong hasil pembagiannya.

Berdasarkan hubungan kerja demikian kiranya jelaslah bahwa terdapat juga motif sosial dan minimalnya resiko dipihak AL. Masuk akal bila pola ini lebih disukai dibandingkan hubungan kerja yang murni bagi hasil maupun upahan. Pola hubungan IS - AL adalah pola hubungan kerja bagi hasil "plus" karena juga mengandung nilai asuransi sosial; meskipun juga mengandung ciri hubungan akrab, dyadic dan pertukaran jasa, namun pola hubungan itu tetaplah tidak sekomples dan multipleks pola hubungan patron-klien tradisional. Azas ekonomi yang dominan mendasari pelebagaan hubungan IS - AL dewasa ini sekaligus menunjukkan gejala erosi hubungan patron-klien.

Lalu, bagaimana kedudukannya dalam struktur sosial dan dinamika pedesaan Kerinci? Seperti halnya di Jawa (Geertz, 1963; Hayami dan Kikuchi, 1981), meskipun perubahan yang berlangsung melahirkan status, peranan dan institusi baru dalam masyarakat, akan tetapi belumlah sampai mendorong terbentuknya polarisasi; yang terjadi adalah proses stratifikasi dan diferensiasi sosial. Para IS dengan strata sosial lebih

tinggi, tidak terpaut pula sebatas bermukim di desa, mereka bisa berasal dari desa lain atau bahkan dari kota. Hal yang perlu diperhatikan -- dalam hal ini berbeda dari di Jawa -- mengingat nilai ekonomi ladang dengan tanaman ekspor yang cukup tinggi nilai tukarnya, ditambah cukup longgarnya aturan hubungan kerja IS - AL, memberi peluang lebih besar bagi berlangsungnya mobilitas vertikal yang memungkinkan AI menjadi IS baru. Di tengah-tengah semakin ketatnya perundangan konservasi hutan, dari segi ekologis, menjadikan pola hubungan IS - AL di sektor pertanian yang berakar tradisi ladang ini tetap potensial mendorong ekspansi lahan ke berbagai penjuru hutan.

V. PENUTUP

Berlangsungnya revolusi agraria di Kerinci pada sekitar penggal tengah awal abad-20 ini lebih ditentukan oleh pengaruh kebijaksanaan pemerintah kolonial serta penetrasi kapitalis, komersialisasi pertanian dan perembesan ekonomi uang ke dalam masyarakat desa. Di antara ciri penting yang dihasilkannya ialah semakin menguatnya peranan ekonomi perkebunan rakyat berakar tradisi ladang yang berorientasi pasar komersial dunia. Selanjutnya revolusi ini disertai dinamika masyarakat desa yang penting di antaranya langgengnya pola hubungan IS - AI yang khas terlembaga di sektor usahatani perkebunan rakyat berakar tradisi ladang tersebut.

Dari segi ekonomi, menguatnya peranan sektor usahatani ini secara nyata telah meningkatkan pendapatan segala lapisan

dan kelompok kaum peisan. Kiranya memang lebih kontekstual apabila fenomena ini diletakkan dalam kerangka konsep peisan (peasant) yang dipandang sebagai satu sistem ekonomi, bukan dari sudut pengklasifikasian petani yang mengerjakan tanah milik sendiri semata. Dalam kenyataannya di Kerinci, baik petani pemilik ataupun tunakisma; penduduk asli atau pendatang; ABRI, pegawai, atau pengusaha; tinggal menetap di desa, kota, atau luar daerah; kesemuanya dapat terlibat sebagai aktor ekonomi tersebut. Dalam hal ini institusi IS - AL cukup longgar menampung keterlibatan aktor-aktor ekonomi itu.

Kecuali bila dilihat dalam kaitan dengan struktur sosial yang lebih luas, kedudukan dan keuntungan di pihak kaum peisan tetaplah lebih rendah. Turun naiknya harga cassiavera yang merupakan tanaman primadona Kerinci di luar jangkauan kuasa mereka. Dalam sistem brooker dan jaringan pasar dunia, dewasa ini seperti dilaporkan Bakosurtanal (1990) menempatkan petani cassiavera diperkirakan hanya mendapatkan 12,83% margin keuntungannya.

Relevansinya dengan pembangunan pertanian pasca-kemerdekaan, khususnya setelah periode orde baru, jika hampir sepanjang PJP I Pembangunan pertanian pedesaan lebih tertuju pada sektor pertanian sawah, tampaknya pertanian pedesaan Kerinci memilih jalan lain. Produksi tanaman ekspor mempunyai arti penting sebagai sumber devisa nasional terbesar setelah minyak. Sejak lama sektor perkebunan merupakan sentra produksi terpenting produk-produk ini (Birowo, Junghans dan Scholz, 1993(1979)). Keunggulan-

keunggulan tertentu dari sistem usaha tani ini sepatutnya memperoleh perhatian. Dalam kasus Kerinci, kiranya yang perlu dieliminir adalah dampak ekologis dari sistem usahatani perkebunan rakyat yang berakar tradisi ladang itu. Tekanan terhadap areal hutan bahkan hingga Taman Nasional masih terus berlangsung. "Boom" perluasan ladang pada dekade 1980-an mencapai puncaknya pada ahun 1986 dengan kenaikan 150, 2% luas dan 256% KK peladang dibanding setahun sebelumnya. Jika pada tahun 1985 luasnya 11.000 Ha dengan jumlah 1.763 peladang, sedangkan tahun 1988 diperkirakan sudah mencapai luas 50.000 Ha dan 14.286 peladang (Bakosurtanal, 1990; dalam laporannya digunakan istilah perambah).

Hal yang serius lainnya ialah menyangkut dilema kecenderungan perubahan penguasaan tanah. Meningkatnya komersialisasi dan laju pertumbuhan penduduk, cepat atau lambat, meski mulanya sebatas mendorong stratifikasi dan diferensiasi sosial, namun selanjutnya tetap potensial mendorong perubahan ke arah polarisasi. Dalam kunjungan lebih akhir penulis di Tahun 1995, hasil pengamatan menunjukkan adanya kecenderungan semakin terkonsentrasinya kepemilikan tanah pada segelintir orang sangat kaya di desa, sementara gejala buruh tani pun meningkat. Bagi kalangan orang sangat kaya di desa yang jumlahnya paling hanya 2-5 keluarga itu, jika terbetik berita ada orang yang akan menjual lahan pertanian, berapapun harganya dan di manapun jauh letaknya tanpa banyak ragu mereka siap membeli. Tenaga kerja buruh tani atau anak

ladang, berasal dari dalam atau luar desa tidaklah susah mencarinya. Sebab persediaan pasar tenaga kerja yang besar.

Hingga saat ini terkesan praktek bentuk hubungan produksi pertanian sistem IS - AL tampak masih lebih diminai dibandingkan bentuk hubungan produksi lainnya di Kerinci. Fenomena ini amat kentara dalam pengusahaan pertanian tanaman komersial cassiavera. Bagi orang kaya berlahan luas tidak mungkin mereka mampu mengolah seluruh lahannya tanpa mengerahkan tenaga kerja luar keluarganya. Dengan sistem hubungan IS - AL induk semangat menganggotakan setidaknya perwatan dan jaminan harapan akan hasil produksi pertaniannya pun lebih menguntungkan. Di sisi lain bagi petani kecil dan tunakisma bagaimanapun juga menjadi analadang dengan beberapa sifat tradisional dalam hubungan produksi, tetapi lebih aman atas jaminan keselamatan subsistensi serta ancaman resiko dan ketidakpastian. Persoalannya sejauh manakah mekanisme sosial budaya berwujud institusi hubungan IS - AL ini akan langgeng bertahan di tengah desakan terus meningkatnya komersialisasi populasi, kesenjangan penguasaan tanah, dan berbagai perubahan pesat di dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Sejauhmanakah legitimasi dan patronasi berdasarkan penguasaan atas tanah dapat bersinambung dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat desa? Hingga mana pulaperubahan-perubahan yang berlangsung potensial mendorong terwujudnya bentuk-bentuk perlawanan petani kecil, analadang dan buruh tani, sekalipun laten atau tersembunyi sifatnya?

Daftar Pustaka

- Amri Marzalia (1993), "Beberapa Pendekatan dalam Kajian tentang Respon Petani terhadap Tekanan Penduduk di Jawa" dalam *JJIS* No. 4, PAU -IS-UI - Gramedia, Jakarta
- Annick Fedensieu (II), "Agroforestry and Phytopractices A Support to Buffer Zone Management in Kerinci Seblat National Park, Anthropological survey"
- A. T. Birowo, K. H. Junghans dan Ulrich Scholz (1993) "Bentuk-bentuk Pengorganisasian Produksi Pertanian" dalam Ulrich Plank (Ed.), *Sosiologi Pertanian*, Obor, Jakarta
- Bakosurtanal (1990), *Laporan Survey TNKS Provinsi Jambi*, Bappeda Tk. I Jambi
- Clifford Geertz (1976 (1963)), *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bhratara KA., Jakarta
- C. W. Watson (1989), *Kerinci Two Historical Studies, Occasional Paper, Center of Southeast Asian Studies*, University of Canterbury
- Edi Indrizal, Hazwan dan Musral (1992), *Pola Pertanian Lahan Miring di Kawasan Kerinci Analisa Proses Perubahan Ekologi dan Pertemuan Multikepentingan*, laporan hasil penelitian (belum dipublikasikan), PSPPSB UNAND dan WWF for Nature Project 3941
- Edi Indrizal, 1995. Dinamia Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pedesaan Hutan kasus desa-desa perbatasan TNKS, *Jurnal Analisis CSIS* Tahun XXIV No. 1, Arah Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Eric R. Wolf (1983 (1966)), *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali Pers, Jakarta
- Everett M. Rogers, *The Subculture of Peasantry*.
- Fritshof Kuhren (1993) "Struktur Pertanian" dalam Ulrich Planck (Ed.), *Sociologi Pertanian*, Obor, Jakarta,
- James C. Scott (1983 (1976)), *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta,

- "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" in S. W. Schmidt, L. Guanzi, C. H. Lundt and J. C. Scott (Ed.), *Friends, Followers, and Factions: A reader in Political Clientelism*, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, ...
- Sajojyo (1976). Kata Pengantar Edisi Indonesia Geertz: *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bintara KA., Jakarta
- Schrieke (1955) *Indonesian Sociological Studies* - L. van Hoese, The Hague and Bandung
- WWF for Nature Project 3941 (1990), *Program Pengembangan Masyarakat, Risalah Singkat Kemajuan Program*, Sungai Putih
- Yujero Hayami dan Masao Kikuchi (1987 (1981)), *Dilema Ekonomi Desa*, VOL, Jakarta

*Pokok-pokok pikiran di dalam artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di Indralila, Harau dan Merak (1991/1992) "Pola Pertanian Lahan Miring di Kawasan Kerinci: Analisis Proses Perubahan Ekologi dan Pertemuan Multi-kepentingan" yang disponsori oleh WWF for Nature Project 3941. Di samping itu beberapa konsep, menginterpretasikan kembali dan menambah analisis telah penulis lakukan berdasarkan penelitian lapang yang dilakukan pada periode 1994/1995 yang terdukung oleh dukungan dari The Toyota Foundation. Untuk itu Penulis menyampaikan terima kasih atas kerjasama personal maupun lembaga diberikan di atas. Penulis juga berutang budi kepada Prof. DR. Sajojyo (IPB) dan DR. Anni Masrah (JH) yang banyak memberi dorongan semangat dan berkesempatan mendiskusikan beberapa bagian ini dalam rangka perampingan tulisan ini.